

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan tujuan akhir dari suatu pembangunan. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai taraf hidup yang layak bagi masyarakat dengan meningkatkan pendapatan berbasis sumber daya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati usia yang panjang dan sehat, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang produktif (BPS, 2023).

Pembangunan manusia menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah indikator yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berfungsi sebagai instrumen pengukur yang menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi, menjadi indikator kualitas hasil dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi bukanlah semata-mata peningkatan angka-angka statistik, melainkan sebuah konsep yang mencakup sejumlah inisiatif dan langkah-langkah strategis. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup di suatu negara atau daerah, dengan fokus pada peningkatan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat kuantitatif, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan untuk menciptakan indikator yang bisa memperhitungkan dimensi dasar pembangunan manusia serta kebebasan seseorang dalam memilih. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan sejumlah indikator yang dirancang

sedemikian rupa agar ukurannya tetap sederhana, namun mencakup aspek-aspek sosial dan ekonomi yang relevan. Upaya ini bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat dan perkembangan sosial-ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aryanto (2017), IPM merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari perkembangan manusia, dan untuk memahami sejauh mana individu memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup mereka. Secara spesifik UNDP mengesahkan bahwa ada empat faktor pokok yang ada dalam pembangunan manusia yaitu, produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (Prakoso, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah didukung oleh dunia melalui *United Nation Development Programme* (UNDP) ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Besaran angka indeks pembangunan manusia (IPM) secara simultan dianalisis dari berbagai aspek yang diduga dapat mempengaruhi naik turunnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM atau *Human Development Index* (HDI) mencakup tiga aspek atau komponen pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar (Faqihudin, 2010). Tiga komponen tersebut antara lain umur panjang dan hidup yang sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*desent standart of living*). Terdapat beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur indikator-indikator tersebut misalnya dalam mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup ketika lahir, untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dan untuk mengukur dimensi hidup yang layak dapat menggunakan indikator kemampuan ekonomi dari daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita dalam pencapaian hidup yang layak (Hanif, 2018).

Tabel 1. 1
Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon
dengan merinci tiga dimensi dasar IPM
Tahun 2013-2022

Tahun	Dimensi Dasar IPM				IPM (%)
	Kesehatan (th)*	Pendidikan**		Standar Layak Hidup***	
		RLS (th)	HLS (th)		
2013	71,75	9,33	12,58	10,56	72,27
2014	71,77	9,53	12,93	10,61	72,93
2015	71,79	9,76	12,94	10,73	73,34
2016	71,83	9,87	13,07	10,82	73,70
2017	71,86	9,88	13,08	11,10	74,00
2018	71,99	9,89	13,09	11,40	74,35
2019	72,13	9,90	13,11	11,93	74,92
2020	72,26	9,91	13,12	11,80	74,89
2021	72,44	10,12	13,13	11,81	75,25
2022	72,74	10,33	13,14	12,09	75,89

*Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Cirebon

**Terdiri atas Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Cirebon

***Capaian Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan di Kota Cirebon (Data diolah), 2023.

Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak. Tabel 1.1 menunjukkan IPM di Kota Cirebon pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, IPM Kota Cirebon adalah 72,27 persen, dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 74,92 persen. Situasi berbeda terjadi pada tahun 2020 dimana IPM Kota Cirebon turun menjadi 74,89 persen. Mengutip dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon (2022) IPM Kota Cirebon tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,03 poin, hal ini

disebabkan karena pandemi *Covid-19*, dan meningkat kembali 0,36 poin pada tahun 2021 menjadi 75,25 persen. Dan IPM Kota Cirebon pada tahun 2022 adalah 75,89 persen meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya. Keberhasilan ini memberi gambaran positif tentang upaya pembangunan manusia yang efektif di Kota Cirebon, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 1. 2
Laju Pertumbuhan Dimensi Dasar
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon
Tahun 2013-2022

Tahun	Laju Pertumbuhan Dimensi Dasar IPM			
	Kesehatan (%)*	Pendidikan**		Standar Layak Hidup (%)***
		RLS (%)	HLS (%)	
2013	0,07	0,11	0,16	1,83
2014	0,03	2,14	2,80	0,47
2015	0,03	2,41	0,08	1,13
2016	0,05	1,13	1,00	0,83
2017	0,04	0,10	0,08	2,59
2018	0,18	0,10	0,08	2,70
2019	0,19	0,10	0,15	4,65
2020	0,18	0,10	0,08	-1,09
2021	0,25	2,12	0,08	0,08
2022	0,40	2,07	0,08	2,37

*Capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Cirebon

**Terdiri atas Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Cirebon

***Capaian Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan di Kota Cirebon (Data diolah), 2023.

Tabel 1.2 memberikan gambaran laju pertumbuhan dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon dari tahun 2013 hingga 2022. Dalam dimensi kesehatan, terdapat fluktuasi laju pertumbuhan yang relatif rendah dari tahun ke tahun, berkisar antara 0,03 persen hingga 0,40 persen.

Pendidikan menunjukkan variasi yang lebih signifikan, dengan laju pertumbuhan yang bervariasi antara 0,10 persen hingga 2,41 persen. Sementara itu, dimensi standar hidup mencatat perubahan yang relatif stabil, meskipun ada tahun tertentu yang mencatat penurunan, seperti pada tahun 2020 dengan persentase -1,09 persen. Secara keseluruhan, tren menunjukkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup selama periode tersebut, walau terdapat fluktuasi yang perlu diperhatikan. Peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2018 dan 2019, khususnya dalam dimensi standar hidup layak yang mencapai laju pertumbuhan sebesar 4,65%

Pengembangan kualitas manusia merupakan suatu proses peningkatan kapasitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan kemampuan ekonomi. Tujuan dari pengembangan kualitas manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan individu secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Bagi negara berkembang menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* (Ginting, 2008) menyatakan bahwa hingga pada akhir tahun 1990-an pembangunan manusia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Trisno & Oktarina, 2022).

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian (Dama, 2016).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah dan dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.

Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dengan adanya perubahan PDRB dari satu periode ke periode berikutnya, yang merupakan salah satu petunjuk nyata pembangunan suatu daerah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung merupakan keberhasilan implementasi kebijakan suatu daerah (Irawan, 2022).

Tabel 1. 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kota Cirebon
Tahun 2013-2022

Tahun	PDRB (atas dasar harga konstan)	Pertumbuhan Ekonomi
2013	Rp. 11.863.884,92 Juta	4,90
2014	Rp. 12.541.219,47 Juta	5,71
2015	Rp. 13.269.243,42 Juta	5,81
2016	Rp. 14.077.046,46 Juta	6,09
2017	Rp. 14.893.138,76 Juta	5,80
2018	Rp. 15.817.178,00 Juta	6,20
2019	Rp. 16.812.488,95 Juta	6,29
2020	Rp. 16.648.213,49 Juta	-0,98
2021	Rp. 17.155.748,66 Juta	3,05
2022	Rp. 18.030.254,41 Juta	5,10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, 2023

Tabel 1.3 mencerminkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan dan tingkat pertumbuhan ekonomi kota Cirebon dari tahun 2013 hingga 2022. PDRB Kota Cirebon mengalami peningkatan secara konsisten sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2013, PDRB mencapai Rp. 11.863.884,92 Juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90 persen, dan setiap tahunnya, tercatat peningkatan yang signifikan. Puncak pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2019 dengan PDRB mencapai Rp. 16.812.488,95 Juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,29 persen. Namun, terdapat penurunan pada tahun 2020 seiring dengan dampak pandemi *COVID-19*, di mana PDRB mencapai Rp. 16.648.213,49 Juta dengan pertumbuhan ekonomi negatif sebesar -0,98 persen. Wali Kota Cirebon Drs. H. Nashrudin Azis, SH menjelaskan bahwa tak hanya sektor kesehatan, melainkan sektor perekonomian, pendidikan, sosial hingga ke mentalitas semua orang pun ikut terguncang akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun demikian, tahun 2021 mencatat pemulihan dengan PDRB sebesar Rp. 17.155.748,66 Juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,05 persen, dan tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan PDRB mencapai Rp. 18.030.254,41 Juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 persen. Data ini mencerminkan ketahanan dan dinamika ekonomi Kota Cirebon selama satu dekade terakhir, yang dapat menjadi landasan bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara/daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan terciptanya lapangan kerja yang nantinya akan meningkatkan pembangunan ekonomi itu sendiri.

Suatu negara/daerah dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep dari UNDP, bahwa pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas kesempatan atau peluang bagi penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya

meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Laisina et al., 2015).

Kota Cirebon tercatat sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang mengalami peningkatan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menduduki peringkat ke-7 di tingkatan IPM Jawa Barat. Prestasi tersebut tidak hanya mencerminkan kemajuan luar biasa dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat kota Cirebon, tetapi juga menegaskan peran strategisnya sebagai kontributor utama dalam mencapai tingkat IPM tertinggi di wilayah Ciayumajakuning.

Tabel 1. 4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Wilayah Ciayumajakuning
Tahun 2013-2022

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)				
	Kota Cirebon	Cirebon	Indramayu	Majalengka	Kuningan
2013	72,27	65,06	62,98	63,71	66,16
2014	72,93	65,53	63,55	64,07	66,63
2015	73,34	66,07	64,36	64,75	67,19
2016	73,70	66,70	64,78	65,25	67,51
2017	74,00	67,39	65,58	65,92	67,78
2018	74,35	68,05	66,36	66,72	68,55
2019	74,92	68,69	66,97	67,52	69,12
2020	74,89	68,75	67,29	67,59	69,38
2021	75,25	69,12	67,64	67,81	69,71
2022	75,89	70,06	68,55	68,56	70,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, 2023

Tabel 1.4 mencerminkan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Kota Cirebon dan wilayah lain di Ciayumajakuning selama periode 2013 hingga 2022. Dengan konsistensi, data menunjukkan bahwa IPM Kota Cirebon secara berkelanjutan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Pada tahun 2013, Kota Cirebon mencapai IPM sebesar 72,27 persen, sementara wilayah lain, seperti Kabupaten Cirebon (65,06 persen), Kabupaten Indramayu (62,98 persen),

Kabupaten Majalengka (63,71 persen), dan Kabupaten Kuningan (66,16 persen), menunjukkan angka yang lebih rendah. Pertumbuhan IPM Kota Cirebon terus mendominasi sepanjang periode, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan IPM sebesar 75,89 persen, sementara wilayah lainnya, meskipun menunjukkan peningkatan, tetap berada di bawah IPM Kota Cirebon. Peningkatan yang konsisten ini mencerminkan pencapaian yang luar biasa dan komitmen kuat pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan standar pembangunan manusia.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Melalui berbagai macam kebijakan salah satunya adalah pengeluaran pemerintah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui indeks pembangunan manusia.

Pengalokasian pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja berdasarkan fungsi yang tepat akan menyebabkan terhindarnya dari kondisi *multiplier* ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 33 klasifikasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja berdasarkan fungsi terbagi menjadi sembilan fungsi yakni pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Afriyansyah & Khusaini, 2018).

Di antara fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendorong dan mewujudkan aspek tersebut dibutuhkan sebuah alokasi anggaran yang tepat yang terangkum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

dalam suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia.

Tabel 1. 5
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon
Per Fungsi (Milyar Rupiah)
Tahun 2013-2022

Tahun	Fungsi		
	Ekonomi	Kesehatan	Pendidikan
2013	69,758,600,872	260,313,839,372	270,022,855,371
2014	87,737,165,398	273,152,975,478	415,940,652,913
2015	49,934,984,125	44,388,996,492	70,576,747,532
2016	108,227,793,403	435,517,941,352	389,712,820,771
2017	82,822,748,303	474,819,268,439	368,080,396,403
2018	81,857,132,348	484,305,736,907	348,259,882,313
2019	84,500,350,270	588,842,407,051	361,537,614,548
2020	90,293,543,740	634,968,734,902	371,399,248,543
2021	84,409,135,665	543,801,827,681	363,420,329,894
2022	123,787,143,541	543,718,068,891	408,986,310,770

Sumber: Direkroral Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah

Tabel 1.5 menyajikan rincian pengeluaran pemerintah Kota Cirebon dalam tiga fungsi utama, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, selama periode 2013 hingga 2022. Dalam konteks ekonomi, pada tahun 2013, pemerintah Kota Cirebon mengalokasikan sekitar 69,76 milyar rupiah, yang kemudian mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2016 menjadi 108,23 milyar rupiah. Fungsi kesehatan menunjukkan alokasi dana tertinggi pada tahun 2020, mencapai sekitar 634,97 milyar rupiah, sedangkan fungsi pendidikan mencatat puncak alokasi pada tahun 2014 dengan angka sekitar 415,94 milyar rupiah. Pada tahun 2022, fungsi ekonomi mencapai 123,78 milyar, sementara fungsi kesehatan dan pendidikan mencapai sekitar 543,72

milyar rupiah dan 408,99 milyar rupiah, secara berturut-turut. Peningkatan signifikan dalam alokasi dana ini mencerminkan komitmen pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung sektor-sektor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (Bappeda, 2023).

Tabel 1. 6
Pendapatan Perkapita Kota Cirebon
Tahun 2013-2022

Tahun	Kategori		Pendapatan Perkapita (Rupiah)
	Penduduk (Jiwa)	PDRB (Rupiah)	
2013	301.728	13.611.965,21	45.113
2014	304.584	15.037.851,20	49.371
2015	307.494	16.709.873,50	54.342
2016	310.486	18.139.081,42	58.421
2017	313.325	19.739.682,96	63.000
2018	316.277	21.639.256,31	68.418
2019	319.312	23.491.803,45	73.570
2020	322.322	23.428.792,05	72.687
2021	336.860	24.506.590,00	72.750
2022	341.235	26.617.850,00	78.004

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, 2023

Tabel 1.5 menyajikan data pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan PDRB per kapita Kota Cirebon dari tahun 2013 hingga 2022. Dapat diamati bahwa pendapatan per kapita Kota Cirebon mengalami peningkatan sepanjang tahun. Pada tahun 2013, pendapatan per kapita sebesar 45.113 Rupiah, dan

meningkat secara konsisten hingga mencapai 73.570 Rupiah pada tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan per kapita kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 78.004 Rupiah. Jumlah penduduk Kota Cirebon terus mengalami pertumbuhan seiring waktu, mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 dengan 341.235 jiwa. Namun, adanya peningkatan PDRB mencerminkan nilai ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB Kota Cirebon mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 78.004 Rupiah, menandai tingkat daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun, data di atas mencerminkan dinamika ekonomi dan perkembangan sosioekonomi Kota Cirebon selama periode 2013 sampai 2022.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, teridentifikasi adanya *Gap research* dari variabel independen terhadap variabel dependen. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 7
Gap Research Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Denni Sulistio Mirza (2012) • Isthafan Najmi (2019)
	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.	Novita Dewi, Yusuf, Y., & Iyan, R.Y (2017)

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2023

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mirza (2012) dan Isthafan Najmi (2019). Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita Dewi, Yusuf,

Y., & Iyan, R.Y (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 1. 8

Gap Research Penegeluaran Pemerintah terhadap IPM

	Hasil Penelitian	Peneliti
<p>Penaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Pengeluaran pemerintah (Fungsi ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nur Baeti (2013) • Dewi A. Meydiasari dan Ady Soejoto (2017) • Sintong Ariansyah (2018)
	<p>Pengeluaran pemerintah (Fungsi ekonomi, Kesehatan, dan Pendidikan) tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merang Kahang, M. Saleh, Rachmad Budi Suharto (2016)

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2023

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah (2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagaimana dengan hasil penelitian Nur Baeti (2013) dan Dewi dan Ady (2017) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah (fungsi kesehatan dan pendidikan) berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian menurut Merang Kahang, M. Saleh, dan Rachmad Budi Suharto (2016) pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 1. 9

Gap Research Penadapatan Perkapita terhadap IPM

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh Pendaapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	<ul style="list-style-type: none">• Herdial, Rizka Jafar (2022)• Novi Rahmawati (2021)
	Pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia	Hadi Sasana (2012)

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2023

Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Herdial, Rizka Jafar (2022), dan Novi Rahmawati (2021) Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2012) menunjukkan bahwa pendapatan perkapita belum berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya dan pengambilan waktu sepuluh tahun terakhir didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dampak jangka panjang, serta menangkap tren pembangunan ekonomi sosial yang signifikan dan memberikan wawasan lebih komprehensif tentang efektivitas kebijakan, dinamika penduduk juga perubahan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon Tahun 2018-2022.**

B. Identifikasi Masalah

Perubahan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon antara tahun 2013 sampai 2022 menimbulkan beberapa masalah yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini, yakni :

1. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 sampai 2019, namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2021 dan 2022, pertanyaan muncul tentang dampak perubahan ini terhadap kualitas hidup penduduk Kota Cirebon.
2. Terdapat fluktuasi dalam pengeluaran pemerintah terutama pada sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penurunan signifikan dalam anggaran pemerintah pada tahun 2021 menyebabkan keterbatasan dalam layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.
3. Terjadi peningkatan pendapatan perkapita terutama seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana hubungan antara kedua faktor ini dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Cirebon.

Dengan mengidentifikasi masalah-masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Pada pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah dengan tujuan supaya masalah yang diteliti tidak meluas kemana-mana, selain itu agar penelitian ini bisa selesai sesuai dengan tujuan dan terarah. Sebagaimana latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya batasan masalah ini hanya fokus pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah (dalam sektor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan), dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2013-2022 yang dimana objek dari penelitian ini

adalah Kota Cirebon. Dengan demikian batasan wilayah pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2013-2022.
2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2013-2022.
3. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2013-2022.

b. Rumusan Masalah

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022?
3. Apakah Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022.
4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Cirebon pada tahun 2013-2022.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cirebon tahun 2013-2022.

b. Bagi Pemerintah Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Cirebon agar bisa memahami penyebab atau permasalahan yang ada di masyarakat terutama mengenai pembangunan manusia, agar pemerintah Kota Cirebon dapat membuat kebijakan yang tepat dan sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Cirebon.

c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan informasi serta referensi bagi peneliti lain ataupun bagi pembaca mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon tahun 2013-2022.

Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat khususnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan pemerintah khususnya pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

F. Sistematika Penulisan

Dari kerangka pemikiran ini merupakan deskripsi tentang urutan-urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

a. Bab I : Pendahuluan

Bab pertama membahas tentang permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah. Menyusun dan menguraikan argumentasi dan alasan pentingnya memilih topik penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, dan Pendapatan Perkapita. Sehingga dari pertimbangan dan alasan empiris maka ditarik rumusan permasalahan yang berguna untuk mempermudah penyusunan dalam menentukan pokok permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab pertama juga memuat sistematika penulisan pada penelitian ini.

b. Bab II : Landasan Teori

Bab kedua membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

c. Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ketiga membahas tentang penelitian terdiri jenis dan tempat penelitian, data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

d. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab keempat membahas tentang hasil dan pembahasan

e. Bab V : Penutup

Bab kelima membahas tentang bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah serta saran-saran tentang hal yang berkaitan tentang penelitian.